



Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017 Disahkan

# Dewan Minta Bupati Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Bangli (Bali Post) -

DPRD Bangli akhirnya menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli 2017 untuk disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna, Senin (30/7) kemarin. Meski menyetujui ranperda tersebut, komisi-komisi di DPRD Bangli tetap memberikan beberapa saran dan usul, salah satunya meminta Bupati untuk segera menindaklanjuti temuan yang direkomendasikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah paling lambat 60 hari sejak diteruskannya laporan hasil pemeriksaan tersebut.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata, awalnya diagendakan berlangsung pada pukul 10.00 Wita. Namun rapat ditunda lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak quorum. Rapat akhirnya baru digelar sekitar pukul 14.00 Wita. Dari pihak eksekutif, rapat dihadiri Kepala BKPAD Kabupaten Bangli Gede Suryawan mewakili Bupati. Sejumlah pimpinan OPD lainnya juga tampak hadir dalam rapat itu.

I Dewa Anom Suta selaku pembicara gabungan komisi-komisi DPRD Bangli mengatakan dari laporan keuangan yang disampaikan Bupati, dewan dan eksekutif telah melakukan pembahasan dalam rapat-rapat gabungan komisi. Dalam tahap pembahasan tersebut, telah terjadi suasana perde-

batan, adu argumentasi, antara pihak eksekutif dan legislatif. "Semua itu kita lakukan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi semata-mata sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam rangka membangun komitmen untuk kepentingan Bangli ke depan," jelasnya. Meski demikian, rasa dan jiwa kekeluargaan, lanjut Anom Suta, tidak luntur. Pembahasan yang dilakukan telah dapat menghasilkan sebuah keputusan yang dapat mempresentasikan seluruh kepentingan bersama.

Disampaikan lebih lanjut, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan musyawarah mufakat dari setiap pembahasan, komisi-komisi DPRD Bangli sepakat menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kabupaten Bangli 2017 untuk disahkan menjadi Perda. Meski demikian, ada beberapa saran dan usul dari masing-masing komisi yang harus diperhatikan eksekutif. Pertama, terhadap temuan yang direkomendasikan oleh BPK mengenai laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 yang meliputi tiga aspek (laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan), Bupati diminta segera menindaklanjuti dalam kurun waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diteruskannya laporan hasil pemeriksaan. Kedua, dengan adanya peningkatan opini WTP dari BPK RI yang merupakan capaian tertinggi, komisi di

DPRD mengharapkan agar SDM aparatur sipil negara (ASN) terus ditingkatkan. "Supaya opini WTP dapat kita pertahankan secara berturut-turut," kata Anom Suta.

Sementara itu, Bupati Bangli I Made Gianyar dalam pidatonya yang dibacakan Gede Suryawan mengatakan, dari beberapa catatan dan saran yang disampaikan dewan seperti permasalahan pendapatan daerah, belanja daerah serta silpa dan terkait opini BPK serta masalah tindak lanjut temuan lainnya, selanjutnya akan dibahas dalam rapat-rapat kerja dewan dengan SKPD terkait. Dalam rapat kerja itu, akan digali akar permasalahan sekaligus mencari solusi untuk mengatasi dan menindaklanjuti temuan BPK RI yang selalu menjadi dilema setiap tahun. "Saran, pendapat, dan koreksi dari anggota dewan perlu mendapat perhatian dan apresiasi dari kita sebagai pegangan dan segera menindaklanjuti saran dimaksud sehingga permasalahan yang timbul tidak terulang lagi di tahun yang akan datang," terangnya. (kmb40)

Edisi : Selasa, 31 Agustus 2018

Hal : 14